

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Amy Y.S., Sri Rahayu, dan Vishnu Juwono. (2019). *“Birokrasi dan Governance: Teori Konsep dan Aplikasinya”*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Bayu Dwi Anggono. (2014). *“Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia”*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Indriyanto Seno Adji. (2009). *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Cetakan. 1. Jakarta: Diadit Media.
- Jimly Asshiddiqie. (2016). *“Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara”*, Jakarta: Rajawali Press.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Mashuri Mashab, (2013), *“Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia”*, Cetakan I, PolGov, Fisipol UGM, Yogyakarta
- Ni'matul Huda, (2015). *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang. Setara Press.
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *“Penelitian Hukum” (Cetakan ke-17)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. (2017). *“Argumentasi Hukum”*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ridwan HR. (2020). *Hukum Administrasi Negara (Cetakan ke-16)*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. (2012). *“Ilmu Hukum”*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sri Hajati, Sri Winarsi, Agus Sekarmadji dan Oemar Moechtar. (2017). *“Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan”*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2018). *“Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat”*, Depok: Raja Grafindo Persada Press.
- Tedi Sudrajat. (2017). *“Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan”*, Jakarta: Sinar Grafika Penerbit.

Zainal Arifin Mochtar. (2022). *“Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang”*. Yogyakarta: Buku Mojok Group.

JURNAL:

Asmar, Abd Rais, (2019), "Pengaturan Peraturan Daerah (Perda) Syariah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah."

Dwiyana Achmad Hartanto, (2016), "Kedudukan Tanah Bengkok Sebagai Hak Asal Usul Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa."

Elvida Br Tarigan, Muhammad Husni Thamrin Nasution, Rosmala Dewi, (2017), "Peranan Sekretaris Desa dalam Menunjang Kinerja Kepala Desa."

Evi Nilawat, (2018), "Analisis Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) "Hanyukupi" Desa Ponjong Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul."

Fajar Wirawan, Nanik Sutarni, Muhammad Fauzan Hidayat, (2022), "Pengelolaan Tanah Kas Desa Oleh Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa."

Fauziyah dan Sri Praptianingsih. *“Principles The Rule Of Law In The Settlement Of The Election Of Head Village”* (2017), Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), volume 131 International Conference on Law, Governance and Globalization.

Firmansyah, Firmansyah. "Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa:(Studi Di Desa Kaboro Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima)."

Hartanto, Dwiyana Achmad. "Kedudukan tanah bengkok sebagai hak asal usul pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa."

Harun, Hayono, and Subehan Khalik. "Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Bontoala Kabupaten Gowa."

Haryo Pratopo, (2017), "Pengelolaan Tanah Kas Desa Pada Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Tahun 2001-2016"

Herawati, H., Endah, K., & Garis, R. R. (2022). Peran Kepala Desa Dalam Menjaga Budaya Lokal Di Dusun Karangpete Desa Kalijati Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran

Innesa Destifani, Suwondo, Ike Wanusmawatie, (2013), "Pelaksanaan Kewenangan Desa Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa (Studi Pada Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora)"

M. Iwan Satriawan, (2013), *Politik Hukum Pemerintahan desa di Indonesia*.

Neny Tri Indrianasari, (2017), "Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono)."

Pandi Marsidi, (2017), "Strategi Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kemampuan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Desa Di Desa Muara Wahau Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur."

Raden Handiriono, Desi Hidayati Putri, (2022), "Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengalihan Tanah Kas Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria."

Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*.

Syehurrozi, Muhammad, And Afrinaldy Rustam. "Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti: Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti."

Wirahutama, Tegar Trihatmaja. "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)."

YogaTejaWiguna, Rosmala Dewi, Nina Angelia, (2017), "Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa."

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Permerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Perturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa.

Peraturan Bupati Jember Nomer 37 Tahun 2021 Tentang mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala desa antar waktu.

